

STRUKTUR DAN SISTEM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU

by Ida Bagus Gede Udiyana

Submission date: 24-Aug-2015 11:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 563179763

File name: Forum_Manajemen_Vol_6_No_1_2008_-_Struktur....pdf (328.11K)

Word count: 4608

Character count: 30292

STRUKTUR DAN SISTEM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU

Oleh :

Ida Bagus Gede Udiyana
I Gusti Gde Oka Pradnyana
Ni Nyoman Seri Astini

(Dosen STIMI "Handayani" Denpasar)

ABSTRACT

This article analyse the structure and economic development system of Indonesia of Orde baru period. The analysis is concerned at economic structure of Indonesia, policy, failure and efficacy Indonesian economic development of Orde Baru period.

This article represent the result of library research, therefore the data is secondary data in the form of books, journals and newspaper. This analysis is using the descriptive technique analysis by depicting all related variable with the purpose of writing, then studied in response to raised problems. The result of solution indicate that the economic development resistor structure of Indonesia cover (1) the resident and urbanization, (2) poorness and unemployment, (3) overseas debt. The economic system applied at the Orde Baru period is capitalist economic system. The fundamental problems which arising out and as the causes factor of applied capitalist economic system are, (1) Deficit of payment balance, (2) Indisposed effort climate, (3) highly overseas debt, (4) productive asset domination at some people, (5) large amount of unemployment, (6) Large amount of pauper.

Key words : Economic Structure, Capitalist Economic System, Orde Baru Period.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia semenjak kemerdekaan mengalami pasang surut. Tahun 1945-1966 masa transisi perekonomian karena sebagian besar kegiatan domestik dibebani oleh krisis politik tanpa akhir. Sistem ekonomi yang diterapkan pada saat itu berakibat kesistem ekonomi sosialis dengan cara begitu dominannya

peranan pemerintah melalui BUMN-BMUN dengan bekerja tidak efisien. Puncaknya, tahun 1966 ekonomi ambruk, yang ditandai dengan inflasi nyaris tanpa batas (650%), pengangguran tak terbendung, dan kemiskinan kian bertambah. Setelah itu, disebut masa Orde Baru, ekonomi mulai ditata sedikit demi sedikit menghasilkan capaian yang lumayan, misalnya investasi bergulir dan pengangguran dapat ditekan. Tapi pada tahun 1974 meletus peristiwa Malari,

yang dipicu oleh sentimen investasi asing (khususnya dari Jepang). Situasi ekonomi pada tahun 1981/1982 mengalami *chaos* lagi yang cukup dalam akibat krisis minyak, dimana harga minyak anjlok menjadi sekitar 9 dolar AS/barel, padahal 70-80% penerimaan negara saat itu tergantung dari minyak.

Sejak itu perlahan-lahan pemerintah mulai menggeser beban kegiatan ekonomi ke sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, salah satunya lewat deregulasi perbankan yang dikeluarkan sejak tahun 1983 (Pakjun 1983). Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada bank domestik maupun asing untuk beroperasi dan membuka cabang di Indonesia. Langkah pemerintah berdampak ekonomi tumbuh dengan cepat sehingga rata-rata setiap tahun perekonomian tumbuh sekitar 7%. Pada saat itu pemerintah sudah menerapkan sistem ekonomi kapitalis, konsep dasar kapitalisme adalah pemberian hak untuk individu (*private property right*) yang seluas-luasnya sehingga mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi, peran negara sangat dibatasi dalam kegiatan ekonomi, semuanya diserahkan kepada individu (*private*). Tugas negara adalah menciptakan infrastruktur, rasa aman, melindungi pasar (*market*) dan menciptakan kondisi adanya kepastian hukum..

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut disokong oleh beberapa praktik negatif berikut (Ahmad E.Y, 2007). *Pertama* deregulasi perbankan tidak dibarengi dengan instrumen pengawasan dan penegakan regulasi (*law enforcement*). Akibatnya banyak perbankan beroperasi secara tidak hati-hati (*imprudent*), seperti pelanggaran *legal lending limit* (LLL). *Kedua*, dunia bisnis di Indonesia tumbuh karena

proteksi yang berlebihan dari pemerintah baik, dalam bentuk fasilitas monopoli, kartel, konsesi, tata niaga, dan lain-lain. Implikasinya, daya saingnya sangat rapuh sehingga ketika dihadapkan dengan kompetisi terbuka (dalam pasar internasional) korporasi tersebut langsung ambruk.. *Ketiga*, tanpa disadari pula dunia korporasi Indonesia sangat tergantung dari bahan baku impor serta struktur keuangan yang lebih besar utang ketimbang asetnya (khususnya dari utang luar negeri). Hasilnya begitu utang jatuh tempo perusahaan tidak mampu membayar.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut diatas dampak langsung adalah jatuhnya nilai tukar rupiah. Begitu mata uang rupiah ambruk, sektor swasta maupun pemerintah betul-betul tidak berdaya sehingga menimbulkan krisis moneter, kemudian berubah menjadi krisis ekonomi / politik yang sungguh tidak gampang ditanggulangi. Jika pada periode-periode sebelumnya setiap guncangan ekonomi relatif lebih mudah untuk dipulihkan, maka krisis tahun 1997 memerlukan waktu yang cukup panjang untuk merekonstruksinya. Sekian banyak alternatif pemecahan ekonomi politik sudah disusun, misalnya desentralisasi ekonomi, perbaikan iklim usaha, tata kelola pemerintahan, independensi bank sentral, dan efisiensi BUMN; namun hasilnya tetap kurang menggembirakan hingga kini.

Setelah 10 tahun pasca krisis ekonomi kondisi tetap belum banyak berubah. Misalnya, angka kemiskinan meningkat, memburuknya jumlah pengangguran (tercatat sampai tahun 2006 pengangguran terbuka dan setengah menganggur mencapai 40 juta jiwa), sektor pertanian yang semakin tidak terawat, dan ludesnya kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) akibat proses

eksploitasi yang tidak terukur, jadi tampak figur krisis ekonomi kali ini jauh dahsyat dan dramatis dibandingkan dengan krisis-krisis (ekonomi) sebelumnya, sehingga penanganannya juga menjadi sangat rumit (Ahmad E.Y, 2007).

2. TUJUAN

Studi ini bertujuan antara lain untuk :

Mengetahui kebij¹⁵an ekonomi serta hasil yang dicapai pada masa Orde Baru (tahun 1966 sampai dengan tahun 1997).

1. Mengetahui faktor-faktor struktural penghambat Pembangunan Ekonomi Indonesia.
2. Mengetahui sistem ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru.

3. METODE PENULISAN

Penulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu, semua data adalah data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan surat kabar.

Analisa menggunakan teknis deskriptif analisis dengan cara menggambarkan semua variable yang terkait dengan tujuan penulisan, kemudian dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian pustaka (bukan penelitian empiris) maka penggunaan hipotesis tidak diperlukan.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Struktural Penghambat Pembangunan Ekonomi Indonesia

a. Penduduk dan Urbanisasi

1) Penduduk

Penduduk Indonesia tidak tersebar secara merata, komposisinya

lebih banyak usia produktif. Implikasinya perlu menyediakan lapangan kerja fasilitasi pendidikan dan kesehatan.

Tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia berkisar pada 220 juta jiwa dan sejumlah 150 juta jiwa diantaranya bermukim di pulau jawa. Dengan kepadatan penduduk pulau Jawa di tahun 2000 antara 1000-1100 jiwa per kilometer persegi, maka pulau jawa akan mengandung corak bagaikan sesuatu "pulau kota". Dimensi tambahan padada masalah penduduk Indonesia ialah bahwa pemusatan pemukimannya tidak serasi dengan letak geografis sumber kekayaan alamnya. Satu sama lain hal itu membawa ciri-ciri pokok yang khas pada masalah-masalah kebijaksanaan pada jangka menengah dan jangka panjang. Kebijakan untuk meningkatkan *mutu sumber daya manusia* menjadi sesuatu yang mengandung arti strategis vital, yaitu dalam hal keterampilan teknis, keahlian profesional dan kecerdasan akademis.

2) Urbanisasi

Sentralisasi kegiatan ekonomi yang berpusat diperkotaan dan pada sektor industri, membuat kesempatan tenaga kerja dengan sendirinya digeser kearah yang berlawanan dengan kondisi faktual yang saat itu ada, bahwa tenaga kerja kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan di wilayah pedesaan. Tenaga kerja itu dari waktu ke waktu bergerak meninggalkan sektor pertanian untuk memasuki kegiatan ekonomi yang lebih baru, yaitu sektor industri dan di wilayah perkotaan dengan iming-iming materi yang lebih menjanjikan dari pada di tempat sebelumnya. Sebaliknya, tempat kerja mereka sebelumnya dianggap tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga

keberadaannya tidak perlu dibertahankan lagi secara mati-matian. Inilah realitas yang dijanjikan oleh proses industrialisasi dan memang menjelmakan secara meyakinkan di negara manapun, termasuk di Indonesia.

Persoalan urbanisasi di Indonesia diakibatkan oleh tekanan hidup yang berat di wilayah pedesaan sehingga memaksa mereka bermigrasi ke perkotaan (*premature urbanization*) (Arief, 1991; xiv). Untuk itu urbanisasi seperti ini berciri sangat khas, mereka menuju ke kota tidak melewati fase sektor industri terlebih dulu, namun langsung menuju ke sektor jasa dalam bentuk pekerjaan sektor informal. Dengan kata lain, tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi diatas tingkat industrialisasi yang sanggup dilakukan dengan elemen-elemen pemerintah dan dunia bisnis nasional.

Kondisi ini bisa terjadi di Indonesia karena diakibatkan oleh dua deskripsi besar. *Pertama*, sektor industri perkotaan yang selama ini diprioritaskan dan dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang tersedia ternyata tidak sanggup membuka lapangan kerja profesional dengan modal yang diinvestasikan.

Kedua, sektor pertanian di pedesaan dibiarkan berjalan sendiri tanpa suatu kebijakan yang membuat sektor tersebut menarik untuk dimasuki. Walaupun ada kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan kepada sektor pertanian, sifatnya hanyalah dalam rangka untuk menjamin produksi sektor itu agar bisa memenuhi kebutuhan pasar (walaupun bagi petani sebenarnya tidak menguntungkan) seperti subsidi pupuk, kredit lunak, dan penetapan harga dasar produk.

Persoalan-persoalan itu bisa jadi akan membangunkan kesadaran

pengambil kebijakan bahwa ada persoalan struktural yang begitu gawat atas pilihan strategi industrialisasi yang telah dipilih selama ini, walaupun dalam derajat tertentu kesalahan itu banyak juga terjadi pada level implementasi konsep (dan bukan pada strategi itu sendiri). Pilihan atas strategi pembangunan yang sudah diterapkan selama ini memperlihatkan, bahwa pengambil kebijakan tidak pernah mempersiapkan risiko terhadap kemungkinan-kemungkinan negatif sebagai dampak pilihan tersebut, terbukti pemerintah tidak memiliki kemampuan mencari jalan keluar yang rasional secara ekonomis.

b. Kemiskinan dan Pengangguran

1) Kemiskinan

Penyebab utama dari timbulnya kemiskinan di Indonesia adalah malpraktik pembangunan akibat formulasi kebijakan ekonomi (sosial dan politik) yang salah. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diproduksi oleh pemerintah sejak dulu cenderung mendahulukan kepentingan pemilik modal dan sektor industri / jasa ketimbang pelaku ekonomi skala kecil dan sektor pertanian. Bahkan, kerap kali pelaku ekonomi kecil, yang banyak digeluti oleh masyarakat, seperti sektor informal, banyak digusur untuk digantikan kegiatan ekonomi yang lebih modern, seperti pembuatan pabrik, pusat perbelanjaan, dan sentra-sentra perdagangan / industri. Pola semacam ini terus terjadi setiap tahun sehingga ruang bagi pelaku ekonomi skala kecil untuk mengerjakan kegiatan ekonomi makin sempit. Hal itu bisa juga dilihat dari keberadaan pasar tradisional yang kian lama makin terpinggirkan karena tergusur oleh kepentingan ekonomi yang lain.

Sebetulnya telah banyak kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tersebut, namun masih terdapat banyak kelemahan dari kebijakan kemiskinan tersebut jika dipetakan, kelemahan itu dapat dijelaskan sebagai berikut (Ahmad E.Y, 2007). *Pertama* kebijakan kemiskinan dilaksanakan secara beragam (general) tanpa mengaitkan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah (komunitas). Akibatnya kebijakan sering tidak relevan di satu tempat (komunitas), walaupun di tempat (komunitas) lain program itu berhasil. *Kedua*, definisi dan pengukuran kemiskinan lebih banyak dipasok dari pihak luar (*external imposed*) dan memakai parameter yang terlalu ekonomis (moneter). Implikasinya, konsep penanganan kemiskinan mengalami bisa sasaran dan mereduksi hakikat dari kemiskinan itu sendiri. *Ketiga*, penanganan program kemiskinan mengalami birokratisasi yang terlampau dalam, , sehingga banyak yang gagal akibat belitan prosedur yang terlampau panjang. *Keempat*, kebijakan kemiskinan sering diboncengi dengan motif politik yang amat kental, sehingga tidak memiliki makna bagi penguatan sosial ekonomi kelompok miskin. *Kelima*, kebijakan kemiskinan kurang mempertimbangkan aspek ekonomi kelembagaan sebagai prinsip yang harus dikedepankan, sehingga sebagian kebijakan itu tidak berhasil karena aturan main yang didesain tidak sesuai dengan kebutuhan.

2) Pengangguran

Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi cukup baik, sejak tahun 2004, ekonomi tumbuh melewati ambang 5 persen. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat

Statistik – mencakup revisi sampai dengan tahun 2004 – ekonomi tumbuh masing-masing 5,0 persen, 5,7 persen, dan 5,5 persen pada tahun 2004, 2005, dan 2006.

Sementara itu dalam periode yang sama, angkatan kerja bertambah 1,3 juta, 1,9 juta, dan 0,5 juta. Dengan lapangan kerja dan tambahan angkatan kerja baru tersebut pengangguran terbuka pada tahun 2004 menjadi 10,3 juta (9,9 persen dari total angkatan kerja) dan tahun 2005 menjadi 11,9 juta (11,2 persen).

Dalam tahun 2006 kondisi ketenagakerjaan membaik dengan pengangguran terbuka menurun menjadi 10,9 juta (10,3 persen), penurunan yang pertama kalinya sejak tahun 2000.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa angka pengangguran tidak saja ditentukan oleh lapangan kerja baru yang tercipta tetapi juga oleh tambahan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja yang besarnya cukup fluktuatif.

Penurunan tingkat pengangguran membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kemampuan ekonomi yang makin luas dalam menciptakan lapangan kerja. Ini menuntut kebijakan dengan fokus yang tajam institusi yang kuat, kerja yang keras, serta kesadaran dan kesabaran yang memadai agar masalah pengangguran tertangani secara berkelanjutan (Bambang Prijambodo, 2007).

c. Utang Luar Negeri

1) Skema ULN di Indonesia

Dalam memulai pembangunan, hampir dapat dikatakan semua negara (berkembang) mengalami persoalan dalam pembiayaannya. Hal ini secara rasional bisa dijelaskan/ karena pada saat

pembangunan dimulai diasumsikan negara belum memperoleh penerimaan dana sama sekali. Sementara di pihak lain/ pembiayaan pembangunan perlu dana besar serta baru akan kembali setelah beberapa waktu kemudian. Saat kondisi seperti inilah negara harus menempuh beberapa strategi demi dapat menutup anggaran pembangunan tersebut. Jika dari dalam negeri sudah tidak dimungkinkan untuk memperoleh dana tersebut (paling tidak belum bisa mencukupi atau menutup dana yang dibutuhkan)/ maka . negara melirik sumber luar negeri sebagai alternatifnya. Di sinilah dikenal istilah bantuan atau utang luar negeri (*foreign aid*) sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan negara.

Persoalan utang luar negeri di Indonesia sebenarnya mulai terasa agak serius setelah terjadi transfer netto modal keluar sejak tahun 1985. Transfer netto terjadi jika cicilan utang luar negeri lebih besar daripada jumlah utang baru setiap tahunnya. Dengan kata lain, transfer netto modal keluar (*net resource transfer*) semakin besar. Sebagai contoh, cicilan utang pemerintah Indonesia mencapai US\$ 3,97 milyar pada tahun 1985. Sementara utang baru Indonesia pada tahun tersebut berjumlah US\$ 3,57 milyar, artinya . telah terjadi transfer netto modal keluar sebesar 0,4 milyar pada tahun tersebut. Transfer modal keluar tersebut cenderung akan lebih besar pada tahun-tahun yang akan datang karena pokok pinjaman dari utang-utang dekade sebelumnya sudah mulai jatuh tempo. Tambahan pula/ tingkat bunga pinjaman pada tahun-tahun yang akan datang diramalkan tidak akan turun (Ramli, 1991:3-6). Sejak saat itulah Indonesia terjatuh dalam perangkap L'LN (*debt trap*), yang jumlah kesenjangan antara utang baru dengan

jumlah cicilan kian membesar setiap tahunnya. Tentu saja kondisi ini sangat mencemaskan karena Indonesia berada dalam siklus ketergantungan yang tidak jelas jalan keluarnya.

2. SEJARAH SISTEM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU

Pada periode awal Orde Baru timbul situasi ketidakpastian, keamanan tidak terjamin dan kehidupan ekonomi terganggu, seperti tidak ada harapan lagi bagi Indonesia untuk meraih kemajuan, apalagi bila perubahan tersebut diinginkan secara cepat. Digambarkan oleh Booth dan McCawley (1990), pada masa itu tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor menunjukkan kemunduran semenjak tahun 1950. pendapatan riil per kapita dalam tahun 1966 sangat mungkin lebih rendah daripada tahun 1938. Sektor industri menyumbang hanya sekitar 10 % dari GDP dan dihadapkan pada masalah pengangguran kapasitas yang serius. Di awal dasawarsa tersebut defisit anggaran belanja negara mencapai 50 % dari pengeluaran total negara, penerimaan ekspor sangat menurun, dan selama tahun 1964 – 1966 hiperinflasi melanda negara ini dengan akibat lumpuhnya perekonomian.

Dari beberapa analisis yang dilakukan, setidaknya terdapat empat faktor penting yang menyebabkan terjadinya kemunduran ekonomi pada masa awal Orde Baru. *Pertama*, tidak adanya stabilitas politik. *Kedua*, orientasi dan prioritas dalam kebijaksanaan pemerintah yang terlalu mengejar sasaran-sasaran politik dan ideologi. *Ketiga*, hubungan dengan luar negeri, khususnya negara-negara barat, juga tidak terlalu baik, oleh karena mereka ini tidak dipandang masuk dalam kubu ideologis yang sama. Hasilnya bantuan ekonomi

luar negeri lebih banyak dari Blok Timur, yang oleh berbagai kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaannya jarang menghasilkan proyek-proyek yang layak dan produktif. *Keempat*, kecenderungan ideologis pemerintah pada masa itu untuk mengatur ekonomi dengan campur tangan langsung yang luas sekali (ekonomi terpimpin), misalnya untuk menentukan harga, mengatur produksi dan impor dengan sistem lisensi, dan sebagainya (Sadli, 1987).

Sejarah sistem pembangunan ekonomi masa Orde Baru dipengaruhi oleh tiga kelompok/golongan meliputi : golongan nasionalis merkantilis, golongan patrimonialis dan golongan teknokrat.

a. Golongan Teknokrat (Tahun 1966 – 1974)

Kelompok teknokrat negara melakukan suatu upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang demikian terpuruk. Kosentrasi para teknokrat adalah bagaimana secara dini mencukupi kebutuhan dasar rakyat, menekan angka inflasi, serta meletakkan landasan yang tepat bagi pemulihan ekonomi yang menyeluruh. Untuk bisa melakukan program tersebut tentunya harus memiliki persyaratan tertentu yang sifatnya mutlak, yaitu modal. Padahal seperti yang selama ini dipahami, salah satu kesulitan penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memulai pembangunan ekonomi adalah ketiadaan modal. Tanpa pemecahan masalah ini, boleh jadi prioritas-prioritas pembangunan yang hendak dilaksanakan akan banyak menemui keagalannya.

Untuk itulah selama periode awal Orde Baru tersebut pemerintah sangat memerhatikan pengendalian tingkat inflasi, rehabilitasi infrastruktur fisik,

dan membangun hubungan baik dengan kelompok donor internasional. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ortodoks untuk mengendalikan inflasi yang ada. Komitmen pemerintah Indonesia dengan konsorsium kelompok donor internasional menghasilkan respons yang kuat dari investor domestik dan pelaku bisnis asing. Perekonomian tumbuh rata-rata tiap tahun 6,6 %; tahun 1968 menandai permulaan tahap pemulihan, dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai 10,9 % (Hill, 1996). Pencapaian yang berhasil dilalui ini dalam satu sisi pandang tentunya cukup mengejutkan, mengingat begitu rumitnya persoalan ekonomi Indonesia warisan Orde Lama.

Dengan mencermati jenis-jenis kebijakan yang dilakukan oleh para teknokrat itu, setidaknya ada dua hal penting yang bisa dikemukakan (Ahmad E.Y, 2007). *Pertama*, kesadaran penuh dari pengambil kebijakan yang memandang begitu pentingnya masalah ketersediaan infrastruktur ekonomi sebagai landasan pemulihan maupun akselerasi pembangunan ekonomi. Pemerintah menempatkan mekanisme pasar sebagai instrumen untuk mengelola perekonomian. *Kedua*, menjalin interaksi yang baik dengan dunia internasional dalam rangka memperoleh dana, baik dalam wujud utang luar negeri maupun investasi asing. Dengan begitu, sejak awal boleh dikatakan pembangunan ekonomi Indonesia telah menyandarkan kepada pihak asing sebagai mitra kerjanya. Pola hubungan tersebut dianggap sebagai jalan pintas untuk memecahkan persoalan ekonomi yang begitu kompleks.

Dua sifat penting dari kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut selanjutnya menjadi pilar penting untuk menganalisis setiap kebijakan yang

ditelorkan pada n^o 14 -masa berikutnya. Munculnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA (Penanaman Modal Asing) jelas merupakan pintu pembuka upaya pemerintah untuk mempersilahkan investasi asing masuk Indonesia. Masuknya PMA itu, menurut pemerintah akan menguntungkan Indonesia dalam dua segi sekaligus; menciptakan investasi baru tanpa pemerintah mengeluarkan modal (di mana faktor ini menjadi kendala terpenting) dan membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia. Dari sisi penawaran, investasi tersebut akan menyediakan beragam produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan di sisi permintaan investasi membuka lapangan pekerjaan baru yang berakibat meningkatnya pendapatan serta menguatnya daya beli masyarakat. Pertemuan dua sisi itulah yang akan menggerakkan kegiatan ekonomi secara terus-menerus.

I G G I (*Inter-Government Group on Indonesia*) yang terdiri dari negara-negara maju dan lembaga internasional seperti IMF dan World Bank, juga masih dalam bingkai besar sifat strategi pembangunan ekonomi tersebut sehingga turut mempercepat proses pembangunan ekonomi yang telah dirancang oleh pemerintah. Lewat utang luar negeri itulah proyek-proyek yang disusun oleh pemerintah bisa dilaksanakan setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari IGGI. Walaupun kebanyakan utang luar negeri itu datang ke Indonesia bukan dalam wujud modal (uang), tetapi tetap bermanfaat karena sepenuhnya mendukung setiap program-program yang direncanakan oleh pemerintah. Investasi yang ditanam dan dibiayai dari dana utang luar negeri tersebut membentang dari mulai pembangunan irigasi, sarana transportasi, saluran

komunikasi, maupun jaringan listrik dan air minum.

Sedangkan kebijakan-kebijakan yang bersemangat mekanisme pasar bisa dilihat dari berbagai macam keputusan mengenai tekad pemerintah untuk tidak melakukan intervensi yang terlalu banyak dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itu antara lain meliputi: kebebasan melakukan ekspor dan impor, hak kepemilikan yang tidak dibatasi, pembentukan harga yang ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran, dan menjaga struktur pasar agar tidak bersifat monopoli. Pemerintah harus melakukan campur tangan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang diamanatkan oleh UUD 1945 serta bidang-bidang tertentu yang memenuhi kelayakan untuk diintervensi, seperti sektor pertanian. Dengan ciri semacam itu diharapkan alokasi faktor-faktor produksi bisa berjalan secara efisien.

Terbukti cara yang ditempuh oleh pemerintah pada waktu itu menghasilkan beberapa kemajuan ekonomi yang cukup mengesankan. Dalam hal pendapatan per kapita, misalnya tahun 1969 ketika saat awal Repelita I dimulai pendapatan per kapita masyarakat hanya sekitar Rp. 20.000,-/tahun; tahun 1997 (sebelum krisis ekonomi terjadi) pendapatan per kapita tersebut sudah mendekati angka Rp. 2.700.000,-/tahun atas dasar harga berlaku. Demikian halnya dengan akselerasi nilai investasi di Indonesia. Pengeluaran investasi naik dari 5% GDP tahun 1966 menjadi 20% dalam tahun 1973. Keadaan ini mencerminkan naiknya modal asing dan bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia (Booth dan Mc Cawley, 1990). Dua hal tersebut merupakan bukti yang cukup akurat untuk menyimpulkan keberhasilan

pembangunan ekonomi yang dilakukan pada masa itu.

b. Golongan Nasionalis – Patrimonialis (1974 – 1997)

Untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Setelah kelompok teknokrat begitu mendominasi warna kebijakan dalam kurun waktu 1966 – 1973, berikutnya kelompok nasionalis patrimonialis memanfaatkan peluang penolakan oleh sebagian masyarakat (yang disuarakan oleh mahasiswa dan sebagian intelektual) terhadap intervensi asing dan menyodorkan formulasi kebijakan baru yang lebih memihak kepada kepentingan rakyat kecil. Kebijakan yang ditelurkan antara lain : (1) kebijakan investasi asing menjadi jauh lebih restriktif. Seluruh investasi asing diharuskan dalam bentuk *joint venture* dan penyertaan nasional harus ditingkatkan dalam periode tertentu; (2) pemerintah meluncurkan sejumlah program kredit bagi pengusaha pribumi yang didanai melalui anggaran belanja negara (APBN). Sebagai contoh, pada tahun 1974 digulirkan Kredit Mini, lantas Kredit Canda Kulak (KCK), dan Inpres Pasar pada tahun 1978; dan (3) pemerintah menerapkan tindakan-tindakan protektif terhadap sektor industri kecil, lewat Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BPIK) yang dimulai pada tahun 1975 (Zaidi, 1998).

Kebijakan baru ini berangkat dari sebuah kritik yang cukup terfokus, di mana dinyatakan bahwa kebijakan liberal yang dimotori oleh para teknokrat hanya akan memperkuat sektor modern yang lebih efisien dengan mengorbankan yang kurang efisien dan lebih tradisional, yang pada gilirannya akan memperburuk kesenjangan sosial. Kebanyakan pengusaha pribumi yang tidak efisien itu betul-betul terlalu lemah untuk ikut

dalam permainan liberal tersebut. Menurut kelompok ini, melindungi pengusaha pribumi dari kepunahan dan membangun mereka untuk tumbuh kuat dan otonom seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah (Mas'ood, 1989). Semangat inilah yang terus dipupuk oleh kelompok di luar para teknokrat untuk merevisi strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan Indonesia. Dengan begitu, langkah-langkah tersebut jelas berbeda secara cukup diametral dengan strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok teknokrat. Setidaknya perbedaan tersebut bisa dicermati dari dua penjabaran berikut (Ahmad E.Y, 2007). *Pertama*, digesernya prinsip mekanisme pasar sebagai rangsangan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan prinsip "intervensi terseleksi" dari pemerintah, khususnya kepada pelaku ekonomi kecil dan pribumi. Dengan kata lain, warna kebijakan ini lebih diorientasikan kepada upaya perbaikan distribusi ekonomi melalui intervensi pemerintah yang selama ini dianggap gagal dilakukan oleh kelompok teknokrat. *Kedua*, kecenderungan untuk mulai meninggalkan peran investasi asing dalam sumbangannya terhadap perekonomian nasional, karena dianggap hanya menyerahkan kekuasaan ekonomi nasional kepada pihak asing. Padahal kebijakan teknokrat sebelumnya justru bersahabat dengan investasi asing karena dianggap bisa mengatasi persoalan kelangkaan dana untuk penciptaan investasi baru.

Dalam perkembangannya yang paling mutakhir, pemikiran dari kelompok patrimonialis tersebut masih bisa ditelusuri dari isu konsep ekonomi kerakyatan yang intens disuarakan sejak dekade 1990-an, dan bahkan begitu

menggema pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dalam 10 tahun terakhir ini. Tokoh yang begitu gigih menyuarakan konsep ekonomi kerakyatan tersebut adalah (Alm) Prof. Dr. Murbyarto. Konsep ekonomi kerakyatan ini tidak berbeda jauh dengan yang diharapkan dari kaum patriomonalis di muka, yakni dikonsentrasikannya kegiatan ekonomi kepada pelaku ekonomi kecil yang bersentuhan dengan sebagian besar masyarakat. Dalam konteks 4 ini pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi : (i) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi ekonomi masyarakat berkembang; (ii) memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat; dan (iii) melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah (Mubyarto, 1997).

c. Golongan Nasionalis – Merkantilisme (1974 – 1997)

Kemudian pada periode yang sama juga berkembang pemikiran yang datang dari kelompok nasionalis untuk lebih mengagendakan pembangunan industri strategis yang berbasis kepada teknologi tinggi. Kelompok ini berpandangan bahwa kebijakan industrialisasi yang ditempuh oleh para teknokrat dengan mengandalkan kepada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tidaklah memadai untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, karena sifatnya yang cepat habis. Mereka lebih percaya kepada industrialisasi padat teknologi sehingga memiliki keunggulan kompetitif (*competetive advantage*) dan berdampak kepada akselerasi pendapatan per kapita yang melesat cepat. Pendekatan ini, karena membutuhkan dana yang relatif besar,

mempersyaratkan intervensi pemerintah yang besar (bahkan investasi sebesar mungkin murni dilakukan oleh pemerintah) karena pihak swasta dianggap tidak akan kuat memikul beban modal yang dibutuhkan.

Apa yang dikembangkan oleh kelompok nasionalis tersebut berwujud pada terciptanya industri-industri strategis yang berbasis teknologi dan seluruhnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Industri-industri itu membentang dari mulai industri dirgantara, besi baja, persenjataan dan amunisi, bahan peledak, kereta api dan telekomunikasi, yang keseluruhannya berada dibawah koordinasi Menristek saat itu, yakni Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Sekaligus, strategi pembangunan tersebut memperdalam tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian dan meninggalkan prinsip mekanisme pasar secara lebih ekstrem. Lebih jauh lagi, model pembangunan ekonomi yang dilakukan ini benar-benar mengabaikan kenyataan riil yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa sebagian besar dari mereka sesungguhnya masih bergelut pada sektor pertanian.

C. PENUTUP

1. Struktur penghambat pembangunan ekonomi Indonesia meliputi (1) Penduduk dan Urbanisasi (2) Kemiskinan dan Pengangguran (3) Utang Luar Negeri.
2. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi kapitalis dengan didasarkan kebijakan ekonomi sebagai berikut : (1) kekuatan-kekuatan pasar akan memainkan peran yang vital dalam stabilisasi ekonomi; (2) perusahaan-perusahaan negara akan beroperasi

berdasarkan persaingan dengan sektor swasta. Pemberian kredit dan alokasi devisa yang berdasarkan preferensi akan dihentikan. (3) sektor swasta diberi dorongan dengan jalan menghapuskan pembatasan-pembatasan lisensi impor terhadap bahan baku perlengkapan; dan (4) penanaman modal swasta asing akan dirangsang dengan suatu UU penanaman modal yang baru, yang memberikan keringanan pajak dan insentif-insentif lainnya. Meliputi : kebebasan melakukan ekspor dan impor, hak kepemilikan yang tidak dibatasi, pembentukan harga yang ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran, dan menjaga struktur pasar agar tidak bersifat monopoli. Pemerintah hanya melakukan campur tangan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang memang diamanatkan UUD 1945 serta bidang-bidang tertentu yang memenuhi kelayakan untuk diintervensi, seperti sektor pertanian. Dengan ciri semacam itu diharapkan alokasi faktor-faktor produksi bisa berjalan secara efisien.

3. Masalah-masalah fundamental yang timbul dan sebagai faktor pemicu penerapan sistem ekonomi kapitalis seperti (1). Defisit neraca pembayaran, (2). Iklim usaha yang tidak sehat, (3). Utang luar negeri yang meroket, (4). Penguasaan aset produktif hanya pada segelintir orang, (5). Ketimpangan pendapatan yang cukup serius, (6). Tingginya tingkat pengangguran, (7). Jumlah orang miskin yang masih cukup besar (walau angka resmi menunjukkan pengurangan yang terus-menerus).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, Roeslan, 1965, *Sosialisme Indonesia*, Panitia retooling Aparatur Negara, Yayasan Prapantja, Jakarta
- Abimanyu, Anggito. 2003. *Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia: Aplikasi Model Makro-Modfi dan CGE-Indorani*. Makalah disampaikan dalam Kongres ISEI ke-XV di Batu, 13-15 Juli. Tidak dipublikasikan
- Ahmad E. Y. 2007. *Perekonomian Indonesia*, BPFE-Unibraw, Malang
- Arief, Sritua. 1991. Pengantar. Dalam Ronald Clapham. *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta
- As'ad, Moh, 1998, *Psikologi Industri; Seri Sumber Daya Manusia*, Edisi Keempat Liberty, Yogyakarta.
- Booth, Anne dan Peter McCawley. 1990. (Cetakan kelima). *Perekonomian Indonesia Sejak Pertengahan Tahun Enampuluhan*. Dalam Anne Booth dan Peter McCawley. (eds). *Ekonomi Orde Baru*. LP3ES. Jakarta
- Charles Hampden Tunner. 1995. *The Seven Culture of Capitalism*. Doubleday. Dell Publishing Group. New York
- Damanik, Jayadi, *e.t.al.* 1996. *Membangun di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan multi-Disipliner Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Indonesia*. Pokja PKPM Bersama Interfidei. Yogyakarta

- Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- 16 Gibson, James L. , John M Ivancevich, and James H. Donnelly, Jr, 1995. *organisasi*, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- 11 Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 1994. "Perangkap Pengkategorian Abstrak" atau Persoalan yang Dihadapi dalam Memecahkan salah Keterbelakangan Dalam Dorodjatun Kuntjoro-jakti. (ed.). *Kemiskinan di Indonesia*. 8 Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Mas'oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan struktur Politik Orde Baru 1967-1971*. LP3ES. Jakarta
- 10 Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta
- 9 Muhaimin, Yahya. 1991. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. LP3ES. Jakarta
- Sadli, Mohammad. 1987. Pembentukan Kebijakan Ekonomi di Masa Orde baru: Berbagai Dilema dan resolusinya. Dalam Hendra Esmara. (ed.). *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pem-bangunan: Kumpulan Esei untuk Menghormati Sumitro Djojo Hadikusumo*. ISEI Bekerjasama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- 7 Saidi, Zaim. 1998. *Soeharto Menjaring matahari: Tarik Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980*. Mizan. Bandung
- 5 Saragih, Bungaran. 1998. *Agribisnis: Paradigma Baru pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Yayasan Mulia persada Indonesia Bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan LP IPB. Jakarta

STRUKTUR DAN SISTEM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mhs2007bersama.blogspot.com

Internet Source

1%

2

ekonomisyariah14.blogspot.com

Internet Source

1%

3

ebookread.org

Internet Source

<1%

4

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1%

5

www.pascaunhas.net

Internet Source

<1%

6

www.docstoc.com

Internet Source

<1%

7

www.unsera.ac.id

Internet Source

<1%

8

usupress.usu.ac.id

Internet Source

<1%

9

apseg.anu.edu.au

Internet Source

<1%

10	mubyarto.org Internet Source	<1 %
11	www.stieykpn.ac.id Internet Source	<1 %
12	indonesiatoleran.or.id Internet Source	<1 %
13	www.kabarberita.web.id Internet Source	<1 %
14	schooltv.alsen.sch.id Internet Source	<1 %
15	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.ummy.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On